



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.1

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
1.	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen, dan kondominium.	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.2

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.  Kode Subklasifikasi: BG001								
2.	41011	Bangunan Gedung	Kelompok ini mencakup	Usaha Peker-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN: Selama pelaku	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.3

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Hunian	usaha rancang bangun konstruksi untuk rumah tinggal sementara, rumah tinggal, rumah susun dan apartemen.  Kode Subklasifikasi: GT001	jaan Kon-struksi Terinte-grasi			Standar		usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
3.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kelompok ini mencakup usaha pemba-ngunan,	Usaha Peker-jaan Kon-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.4

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<p>pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan).</p> <p>Termasuk pemba-ngunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan</p>	<p>struksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Mene-ngah, dan Besar</p>				<p>usahanya</p> <p>Kantor Perwakilan BUJKA:</p> <p>3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.5

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.  Kode Subklasifikasi: BG002								
4.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan).	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.6

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Termasuk pembangunan gedung untuk perkan-toran yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual.  Kode Subklasifikasi: GT002					dan dapat diperpanjang.			
5.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran	Usaha Pekerja-an Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.7

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung <i>workshop</i> / bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.	Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.8

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.  Kode Subklasifikasi: BG003								
6.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung <i>workshop</i> /	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA:	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.9

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.  Kode Subklasifikasi: GT003						3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
7.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.10

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung.  Termasuk pemba-ngunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.	Mene-ngah, dan Besar				BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.11

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: BG004								
8.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, dan rumah toko (ruko). Termasuk pemba-ngunan ruko yang oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual. Kode Subklasifi-	Usaha Pekerjaan Kon-struksi Terinte-grasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.12

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kasi: GT004								
9.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.13

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<p>pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.</p> <p>Kode Subklasifikasi: BG005</p>								
10.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	<p>Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai</p>	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	<p>BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p> <p>Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun</p>	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.14

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium.  Kode Subklasifikasi: GT005						dan dapat diperpanjang.		
11.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.15

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.  Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi pendidikan.  Kode Subklasifikasi: BG006	Besar				diperpanjang.			
12.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun	Usaha Pekerjaan Kon-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.16

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konstruksi untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya.  Kode Subklasifikasi: GT006	struksi Terintegrasi				usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
13.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.17

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen.  Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.  Kode Subklasifikasi: BG007	Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
14.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun	Usaha Pekerjaan Kon-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.18

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konstruksi untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Kode Subklasifikasi: GT007	struksi Terintegrasi				usahanya Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
15.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.19

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.	dan Besar				dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.20

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: BG008								
16.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	<p>BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya</p> <p>Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.21

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>real estate</i> dengan tujuan untuk dijual. Kode Subklasifikasi: GT008								
17.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan yang dipakai penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.22

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/ stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumen-tal, gedung negara dan pemerintah pusat/ daerah, bangunan bandara, gedung hanggar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.23

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung <i>power house</i> , gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung <i>tower</i> , gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya.								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.24

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.  Kode Subklasifikasi: BG009								
18.	41020	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikan, <i>erection</i> ,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.25

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau perakitan untuk bangunan gedung.  Kode Subklasifikasi: KP001								
19.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.26

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			hambatan/ jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas ( <i>containers yard</i> ).  Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliha-raan konstruksi pagar/ tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan	Besar							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.27

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			layang. Kode Subklasifikasi: BS001								
20.	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	Kelompok ini mencakup usaha Pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i> , dan <i>fly over</i> . Termasuk juga kegiatan pemba-	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.28

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			ngunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/ tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.  Kode Subklasifikasi: BS002								
21.	42102	Bangunan Sipil	Kelompok ini mencakup	Usaha Peker-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN: Selama pelaku	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.29

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i>	usaha rancang bangun konstruksi bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, <i>underpass</i> , dan <i>fly over</i> . Kode Subklasifikasi: ST001	jaan Konstruksi Terintegrasi			Standar		usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
22.	42103	Konstruksi Jalan Rel	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.30

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.  Kode Subklasifikasi: BS003	Kecil, Menengah, dan Besar				Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
23.	42104	Konstruksi Terowongan	Kelompok ini mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.31

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.  Kode Subklasifikasi: KK014					Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.32

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
24.	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.  Kode Subklasifikasi: BS004	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri
25.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.33

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Air Bersih	pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air	ksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				usahanya. Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.34

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.  Kode Subklasifikasi: BS005								
26.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.35

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.  Kode Subklasifikasi: ST002						diperpanjang.		
27.	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.36

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	dan/atau pemba-ngunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,ba-ngunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/ manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembu-angan dan	Umum, Kualifi-kasi Kecil, Mene-ngah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.37

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemba-karan ( <i>incinerator</i> ) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembu- angan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem <i>septic</i> , konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.38

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>thermal, hydro,</i> panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.  Termasuk limbah rumah sakit dan radioaktif.  Kode Subklasifi- kasi: BS006								
28.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifi-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Kantor Perwakilan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.39

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kembali bangunan sipil elektrik seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.  Kode Subklasifikasi: BS007	kasi Kecil, Mene-n-gah, dan Besar				BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.40

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
29.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Kelompok ini mencakup usaha perkerjasama, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pemba-ngunan gardu induk dan	Usaha Pekerja-an Kon-struksi Terin-tegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.41

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pema-sangan tiang listrik dan menara.  Kode Subklasifikasi: ST003								
30.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.42

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.  Kode Subklasifikasi: BS008								
31.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.43

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit.  Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal	Mene- ngah, dan Besar				BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.44

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.  Kode Subklasifikasi: BS009								
32.	42207	Pembuatan/Pe-ngeboran Sumur Air Tanah	Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pe-ngeboran untuk mendapatkan air tanah, baik	Usaha Pekerjaan Kon-struksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.45

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.  Kode Subklasifikasi: PL005					Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.46

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
33.	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.47

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain-lain  Kode Subklasifikasi: BS020								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.48

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
34.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan ( <i>dam</i> ), bendung	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.49

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan ( <i>free intake</i> ), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.50

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.  Kode Subklasifikasi: BS010								
35.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terinteg-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.51

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konstruksi untuk bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan ( <i>dam</i> ), bendung ( <i>weir</i> ), embung, pintu air, talang ( <i>viaduk</i> ), <i>siphon</i> , <i>check dam</i> , tanggul dan saluran pengendali banjir,	rasi				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.52

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			tanggul laut, bangunan pengambilan ( <i>free intake</i> ), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.  Kode Subklasifikasi:								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.53

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			ST004								
36.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.54

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.55

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.  Kode Subklasifikasi: BS011								
37.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.56

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			untuk bangunan pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga ( <i>jetty</i> ), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan, dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur					Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.57

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.  Kode Subklasifikasi: ST005								
38.	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.58

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan pelabuhan perikanan seperti dermaga ( <i>jetty</i> ), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan.	Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.59

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.  Kode Subklasifikasi:								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.60

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			BS012								
39.	42914	Pengerukan	Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.61

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
40.	42915	Konstruksi	ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.  Kode Subklasifikasi: PL002	Usaha	NA	Menengah	NIB dan	15 hari	BUJKN:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.62

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.	Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar		tinggi	Sertifikat Standar		Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.63

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: BS013								
41.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Kelompok ini mencakup usaha perkerajaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi bangunan sipil pada	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.64

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.  Kode Subklasifikasi: ST006					diperpanjang.			
42.	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifi-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.65

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak	kasi Meningah dan Besar			Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.66

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lingkungan.  Kode Subklasifikasi: BS014								
43.	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pemba-	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.67

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			ngunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan.  Kode Subklasifikasi:					dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.68

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			ST007								
44.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.69

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.  Kode Subklasifikasi: BS015								
45.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Kelompok ini mencakup usaha perkerajaan,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.70

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengadaan dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.  Kode Subklasifi-	rasi				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.71

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kasi: ST008								
46.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.72

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, <i>baseball</i> , <i>rugby</i> , lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, <i>hockey</i> , lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.73

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			berdinding baja <i>galvanized stainless steel</i> standar <i>Olympic</i> , lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.  Kode Subklasifikasi:								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.74

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			BS016								
47.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, <i>baseball</i> ,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terinteg-rasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.75

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar</i>								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.76

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>Olympic</i> , lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.  Kode Subklasifikasi: ST009								
48.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Kelompok ini mencakup	Usaha Pekerja-an Kon-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.77

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			usaha pemba- ngunan, pemelihara- an, pembong- karan dan/atau pemba- ngunan kembali bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan	struksi Bersifat Umum, Kualifi- kasi Kecil, Mene- ngah, dan Besar			menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.78

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan sarana lingkungan pemukiman serta penataan bangunan dan lingkungan (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.79

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			umum dan lain-lain). Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.80

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.81

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pakaian; pengadaan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.  Kode Subklasifi-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.82

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kasi: BS017								
49.	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan reservoir pada pembangkit listrik tenaga air.  Kode Subklasifikasi: KK002	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.83

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
50.	42921	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock</i> dan <i>Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan <i>intake, control gate, penstock</i> dan <i>outflow</i> pada pembangkit listrik tenaga air.  Kode Subklasifikasi: KK003	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.84

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
51.	42922	Konstruksi Pelindung Pantai	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk <i>groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan</i>	Usaha Pekerja-an Kon-struksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.85

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pekerjaan lainnya yang sejenis.  Kode Subklasifikasi: KK004								
52.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembong-	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Mene-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.86

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			karan dan/atau pemba- ngunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan	ngah dan Besar				Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.87

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.  Kode Subklasifi- kasi: BS018								
53.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan	Kelompok ini mencakup usaha	Usaha Pekerja-an Kon-struksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.88

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	perekayasaan, pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia;	Terinteg-rasi				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.89

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.  Kode Subklasifikasi: ST010								
54.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil	Kelompok ini	Usaha Pekerja-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN: Selama pelaku	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.90

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat an Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Mene-nengah dan Besar				Standar		usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.91

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit.  Kode Subklasifikasi: BS019								
55.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Kelompok ini mencakup usaha perencana-an, pengadaan	Usaha Pekerja-an Kon-struksi Terinteg-rasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.92

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit.					Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.93

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: ST011								
56.	42930	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.94

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KP002								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.95

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
57.	43110	Pembongkaran Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar.  Kode Subklasifikasi:	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.96

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			PL001								
58.	43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.97

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pembersihan semak belukar, stabilisasi tanah, pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan <i>sheet pile</i> , jalan sementara, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu;								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.98

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pekerjaan pembuatan kantor, <i>basecamp</i> , direksi kit, gudang, bengkel proyek, pengukuran kembali, pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, papan nama proyek, <i>dewatering</i> ,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.99

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			mobilisasi dan demobilisasi, dan lain-lain pekerjaan sejenisnya; geofisika, geologi atau keperluan sejenis; Termasuk juga penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan Penyiapan Lahan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.100

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			untuk Instalasi Nuklir.  Kode Subklasifikasi: PL003								
59.	43120	Pekerjaan Tanah	Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.101

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			penggalan, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: PL004					BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.102

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
60.	43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	Kelompok ini mencakup pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi:	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.103

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			PL006								
61.	43120	Survei Penyelidikan Lapangan	Kelompok ini mencakup survei dan penyelidikan lapangan termasuk tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material untuk keperluan konstruksi pada	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.104

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: PL007								
62.	43212	Instalasi Telekomunikasi	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.105

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun					Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.106

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomuni-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.107

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: IN002								
63.	43213	Instalasi Elektronika	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.108

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			gedung dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial manage-					Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.109

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>ment system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya.</i>								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.110

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: IN006								
64.	43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.111

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbang-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.112

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an.  Kode Subklasifikasi: IN005								
65.	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.113

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			api  Kode Subklasifikasi : IN012					diperpanjang.			
66.	43216	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.114

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk <i>reflector</i> , deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.115

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			median beton, <i>guardrail</i> , dan perlengkapan lainnya yang sejenis.  Kode Subklasifikasi: IN011								
67.	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.116

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.117

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			instalasi <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)/ <i>Reverse Osmosis</i> (RO), pipa air kotor.  Kode Subklasifikasi: IN007								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.118

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
68.	43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas ( <i>heating</i> ) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.119

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, <i>ducting</i> dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk <i>boiler</i>								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.120

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			domestik alat pembakar ( <i>burner</i> ). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.121

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran  Kode Subklasifikasi: IN013								
69.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Kelompok ini	Usaha Pekerja-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN: Selama pelaku	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.122

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak,	an Konstruksi Bersifat Spesialis			Standar		usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.123

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.124

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.  Kode Subklasifikasi: IN004								
70.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.125

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemasangan ventilasi ( <i>ventilation</i> ), lemari pendingin dan penyejuk udara ( <i>Air Conditioner /AC</i> ) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, <i>ducting</i> dan lembaran logam.	Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.126

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: IN008								
71.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi ( <i>ventilation</i> ), lemari pendingin dan penyejuk udara ( <i>Air Conditioner /AC</i> ) untuk	Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.127

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, <i>ducting</i> dan lembaran logam.  Kode Subklasifikasi: IN009								
72.	43291	Instalasi Mekanikal	Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan-	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.128

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan ( <i>conveyor</i> ),	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.129

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			jalan-tapak bergerak ( <i>travelator</i> ), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.  Kode Subklasifikasi: IN001								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.130

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
73.	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar.  Kode Subklasifikasi : IN014	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.131

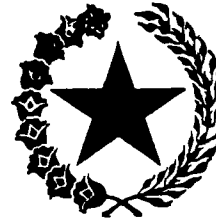
No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
74.	43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi peralatan infrastruktur pertambangan dan seperti: <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i>	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.132

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan coke oven.  Kode Subklasifikasi: IN003								
75.	43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.133

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.  Kode Subklasifikasi: IN010						dan dapat diperpanjang.		
76.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, aluminium,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.134

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis					Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.135

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.  Kode Subklasifikasi: PB001								
77.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan	Usaha Orang Perseorangan Pekerja-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.136

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			an kaca, aluminium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali	an Konstruksi							





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.137

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. Kode Subklasifikasi: PB002								
78.	43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	Kelompok ini mencakup pekerjaan pelapisan lantai atau	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.138

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK007	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.139

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
79.	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk aplikasi bangunan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.140

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan <i>lathing</i> yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.141

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>gypsum</i> , panel penutup akustik, partisi/ sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.142

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.143

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.  Kode Subklasifikasi: PB003								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.144

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
80.	43303	Pengecatan	Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.145

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: PB007								
81.	43303	Pengecatan	Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk	Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.146

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<p>pengecatan atap bangunan.</p> <p>Kode Subklasifikasi: PB008</p>								
82.	43304	Dekorasi Interior	<p>Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan</p>	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	<p>BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.</p> <p>Kantor Perwakilan BUJKA:</p>	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.147

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			gedung dan bangunan sipil. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan <i>lathing</i> yang berkaitan,					3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.148

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur ( <i>kitchen set</i> ), tangga								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.149

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/ sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.150

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.151

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.152

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.  Kode Subklasifikasi: PB004								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.153

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
83.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.154

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			lainnya.  Kode Subklasifikasi: PB005								
84.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada	Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.155

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.  Kode Subklasifikasi: PB006								
85.	43305	Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman	Kelompok ini mencakup pekerjaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.156

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
		Vegetasi	pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan	Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.157

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pohon untuk lokasi bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: PB010								
86.	43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau	Kelompok ini mencakup pekerjaan pembersihan dan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.158

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Bangunan Sipil	perapihan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil untuk dinding luar dengan pembersihan uap atau <i>sandblasting</i> , lapis permukaan marmer, ubin keramik, granit dan lainnya dengan mesin penyiat dan	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.159

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pemoles dan bahan pembersih termasuk perbaikan, pembersihan, dan perawatan umum untuk semua bagian dari bangunan baik interior, eksterior, maupun area sekitarnya.								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.160

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: PB009								
87.	43901	Pondasi Konstruksi	Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	<p>BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.</p> <p>Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.161

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.162

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan sipil lainnya.  Kode Subklasifikasi: KK001								
88.	43902	Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> )	Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/ <i>steiger</i> pada bangunan gedung,	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.163

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			jalan/ jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya  Kode Subklasifikasi : PL008					3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
89.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap /Roofcovering	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.164

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan	Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.165

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			atap.  Kode Subklasifikasi: KK011								
90.	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.166

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.  Kode Subklasifikasi: KK016						3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
91.	43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	Kelompok ini mencakup usaha penyewaan peralatan konstruksi dengan operator minimal kualifikasi	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.167

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			operator tingkat 2 untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: PA001					3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
92.	43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton ( <i>Rigid</i> )	Kelompok ini mencakup pekerjaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.168

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>Pavement</i> )	lapis perkerasan beton atau rigid pavement pada bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK005	Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
93.	43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air,	Kelompok ini mencakup	Usaha Pekerja-an Kon-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.169

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Minyak, dan Gas	pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis pada bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK006	struksi Bersifat Spesialis				menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.170

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
94.	43909	Perkerasan Aspal	Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan aspal ( <i>flexible pavement</i> ) yang meliputi lapis resap pengikat, lapis perekat, laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), laston lapis pondasi	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.171

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(AC-Base), burda, burtu dan lapen dan pekerjaan aspal lainnya yang sejenis pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK008								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.172

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
95.	43909	Perkerasan Berbutir	Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan berbutir yang meliputi agregat kelas A, agregat kelas B dan/atau agregat kelas C dan pekerjaan perkerasan berbutir lainnya yang sejenis pada	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.173

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK009								
96.	43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and	Kelompok ini mencakup pekerjaan	Usaha Pekerjaan Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.174

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>Grouting</i> )	konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan termasuk untuk mengisi rongga dalam tanah, mengisi celah sesar, stabilisasi tanah pada pekerjaan bendungan, pengamanan penggalian selama	Bersifat Spesialis				usahanya. Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.175

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konstruksi terowongan, perbaikan preventif sifat mekanik massa batuan di area kerja, penghentian arus masuk air ke dalam konstruksi dinding penahan tanah dan bebatuan, penguatan, stabilisasi <i>overburden</i> ,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.176

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			termasuk pengeboran lubang <i>curtain hole</i> , pengoperasian <i>grouting</i> dan <i>material grouting</i> , dan untuk pekerjaan <i>grouting</i> sektor pertambangan termasuk penguatan dan stabilisasi lapisan deposit								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.177

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sebelum eksploitasi, persimpangan zona sesar, pengaman-an <i>overburden</i> , stabilisasi sekitar pekerjaan tambang, penurunan permeabilitas massa batuan, penguatan batu bara di daerah dengan risiko								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.178

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			ledakan batu, keterbatasan angin kencang bertiup menahan tanah dan bebatuan, stabilisasi dan penutupan lubang tambang tua pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.179

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lainnya.  Kode Subklasifikasi: KK010								
97.	43909	Pekerjaan Struktur Beton	Kelompok ini mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.180

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton ( <i>rigid pavement</i> ).								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.181

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: KK012								
98.	43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik ( <i>Post Tensioned</i> )	Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik ( <i>post tensioned</i> ) untuk struktur beton pracetak dengan cor	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.182

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK013								
99.	43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api ( <i>Tanur, Anneling, Flare</i> , atau	Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan	Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.183

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>Incenerator)</i>	konstruksi tahan api ( <i>tanur, annealing, flare, incenerator</i> ) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: KK015	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
100.	43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan	Kelompok ini	Usaha Pekerja-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.184

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Konstruksi	mencakup pekerjaan pemulihan lahan kembali ke fungsi semula.  Kode Subklasifikasi: PB011	an Konstruksi Bersifat Spesialis			Standar		usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
101.	70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	Kelompok ini mencakup layanan usaha	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.185

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			terkait: ○ Kajian awal prastudi kelayakan ; ○ Kajian akhir prastudi kelayakan ; ○ Perencanaan proyek investasi infrastruktur; ○ Perancangan proyek investasi	Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.186

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			infrastruktur; o Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur; o Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi; o Pemantau								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.187

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			an pelaksanaan proyek pra-konstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan o Penilaian pengalihan aset								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.188

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: RT001								
102.	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian	Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.189

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			nasihat dan pradesain arsitektural seperti <i>site philosophy</i> , tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.190

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan isu lain yang memengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal <i>siting plan</i> , bentuk dan material yang akan digunakan,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.191

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Nonhunian.  Kode Subklasifikasi: AR001								
103.	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	Kelompok ini mencakup	Usaha Jasa Konsul-	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.192

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan khusus seperti bangunan cagar budaya, bangunan museum, bangunan	tansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.193

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			riset dan teknologi, monumen, bangunan sipil, dan bangunan khusus yang sejenis lainnya. Dalam kelompok ini termasuk kegiatan yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.194

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			<i>promotional material dan presentasi serta as built drawings termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.</i>								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.195

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			Kode Subklasifikasi: AR002								
104.	71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.196

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			terkait kebijakan strategis operasional rencana tata ruang termasuk jasa audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, jasa pemrograman pemanfaatan ruang mencakup darat, laut, udara dan di dalam								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.197

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bumi dan manajemen mitigasi, adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.  Kode Subklasifi-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.198

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			kasi: AL001								
105.	71101	Jasa Pengembangan Wilayah	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait penataan	Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.199

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			ruang wilayah termasuk audit pemanfaatan wilayah dan pengaturan zonasi mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi termasuk kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.200

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
106.	71101	Jasa Pengembangan	provinsi/ kabupaten/ kota, kawasan andalan, kawasan permukiman dan kawasan ruang terbuka publik/ter- buka hijau.  Kode Subklasifikasi: AL002	Usaha Jasa	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.201

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Perkotaan	mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan perkotaan mencakup tata ruang darat, laut,	Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besarnya			Standar		usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.202

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			udara dan di dalam bumi termasuk audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi.  Kode Subklasifikasi: AL003								
107.	71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan	Kelompok ini mencakup layanan	Usaha Jasa Konsultasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.203

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Lansekap	usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan <i>aesthetic landscaping</i> untuk taman, lahan komersial dan permu-	Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.204

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kiman. Meliputi penataan bangunan, audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, termasuk penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.205

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar dan area parkir.  Kode Subklasifikasi: AL004								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.206

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
108.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.207

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan gedung hunian dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik dan rekayasa struktur untuk <i>the load bearing framework</i> dari bangunan perumahan dan komersial,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.208

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bangunan institusi dan industrial.  Kode Subklasifikasi: RK001								
109.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan	Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.209

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung ( <i>weir</i> ), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali	Menengah, dan Besar							



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.210

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, dan/atau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.211

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, dan/atau, alur pelayaran, kolam dan kanal; termasuk jasa nasihat dan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.212

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konsultansi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air.  Kode Subklasifikasi: RK002								
110.	71102	Jasa Rekayasa	Kelompok	Usaha	NA	Menengah	NIB dan	15 hari	Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. BUJKN:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.213

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi seperti jalan	Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar		tinggi	Sertifikat Standar		Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.214

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			(raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), jembatan, jalan layang, <i>fly over</i> , <i>underpass</i> dan terowongan; termasuk jasa nasihat								



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.215

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan konsultasi rekayasa teknik Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.  Kode Subklasifikasi: RK003								
111.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancang-	Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifika	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.216

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			an, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi rekayasa mekanikal termasuk sistem komunikasi, instalasi pipa gas untuk semua jenis bangunan dan/atau sistem pemanas ruangan,	si Kecil, Menengah, dan Besar				Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.217

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			ventilasi, pendingin ruangan, lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan.  Kode Subklasifikasi: RK004								
112.	71102	Jasa Rekayasa	Kelompok	Usaha	NA	Menengah	NIB dan	15 hari	BUJKN:	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.218

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Lainnya	ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait: <ul style="list-style-type: none"><li>o pekerjaan bangunan teknik militer,</li></ul>	Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar		tinggi	Sertifikat Standar		Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.219

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, tempat peluncuran satelit, dan pengelolaan dan pemrosesan bahan-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.220

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			nuklir; o pekerjaan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion olah raga (lapangan sepak-bola, lapangan golf, baseball, sepak bola rugby, lintasan balap mobil dan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.221

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan lain-lain;  o pekerjaan pengolahan air bersih, penyehatan ling-								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.222

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kungan permukiman, pengolahan air limbah, lumpur o tinja, pengelolaan persampahan, dan prasarana dan sarana kawasan permukiman, industri, rumah								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.223

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sakit; dan o pekerjaan sistem kontrol lalu-lintas antara lain sistem kontrol lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.  Kode Subklasifikasi: RK005								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.224

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
113.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa konstruksi	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.225

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik.  Kode Subklasifikasi: RT002								
114.	71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait	Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.226

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa untuk proses produksi, prosedural dan fasilitas industri, manufaktur dan produksi	Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.227

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, alat angkut dan alat angkat, dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambahan termasuk fasilitas produksi								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.228

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan penyimpanan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal, instalasi instrumentasi, instalasi perpipaan minyak, gas, petrokimia dan panas								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.229

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bumi termasuk <i>single point mooring</i> , lokasi pertambangan bawah tanah termasuk di dalamnya <i>hoists</i> , kompresor, stasiun pompa, <i>crushers</i> , <i>conveyor</i> , prosedur <i>recovery</i> dari minyak, gas,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.230

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			petrokimia dan panas bumi, dan jasa desain tiang dan <i>tower</i> bagi kebutuhan elektrikal.  Kode Subklasifikasi: RT003								
115.	71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.231

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.232

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan <i>seismic</i> di darat atau di lepas pantai, pengolahan data <i>seismic</i> , <i>Logging While Drilling</i> (LWD), <i>Measure While Drilling</i>								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.233

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(MWD), dan <i>mud logging</i> .  Kode Subklasifikasi: IT001								
116.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data pada formasi di bawah permukaan	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.234

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			bumi dengan metode lainnya, termasuk di dalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya.  Kode Subklasifikasi: IT002					Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.235

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
117.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri, dan hidrografi	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.236

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			untuk tujuan persiapan pembuatan peta dan topologi melalui udara/satelit, <i>laser scanning</i> , kualitas dan kuantitas minyak bumi, muatan (kargo), batimetri, meteorologi dan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.237

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			oseanografi.  Kode Subklasifikasi: IT003								
118.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan survei, analisis fasilitator prasarana sarana umum meliputi air minum, air	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.238

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			limbah, rumah swadaya, dan jalan lingkungan.  Kode Subklasifikasi: IT004						diperpanjang.		
119.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.239

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.  Kode Subklasifikasi: IT005						BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.		
120.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Orang Perse-orangan	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.240

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Sistem Kendali Lalu Lintas	survei dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.  Kode Subklasifikasi: IT006	Jasa Konsultasi Konstruksi				usahanya.			





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.241

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
121.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.242

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			(weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.243

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, dan/atau, alur								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.244

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.  Kode Subklasifikasi: IT007								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.245

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
122.	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>	Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung	Usaha Orang Perse-orangan Jasa Konsulta nsi Konstruksi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.246

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			(weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung,								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.247

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan/atau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, dan/atau, alur								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.248

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.  Kode Subklasifikasi: IT008								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.249

**A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
123.	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral,	Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.250

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan <i>seismic</i> di darat atau di lepas pantai, pengolahan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.251

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), mud logging, pengujian sumur (well testing).  Kode Subklasifikasi: AT001								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.252

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
124.	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), yang berhubung-	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.253

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
125.	71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	an dengan mikrobiologi, biokimia, dan bakteriologi.  Kode Subklasifikasi: AT002	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.254

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			konstruksi dan fasilitas laboratorium untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.  Kode Subklasifikasi: AT003	Spesialis				Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
126.	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Jasa Konsultasi	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN:  Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.255

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		<i>Oceanography</i>	pengujian dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan <i>oceanography</i> untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan ( <i>dam</i> ), bendung ( <i>weir</i> ), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana	Konstruksi Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.256

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengendali banjir, prasarana <i>check dam</i> dan <i>sabo dam</i> , prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, dan/atau, situ dan kolam, pintu air, talang,								





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.257

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
			kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, dan/atau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.258

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sipil lainnya.  Kode Subklasifikasi: AT005								
127.	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.259

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			seperti kekuatan, keringkahan, konduktivitas, elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti <i>metal</i> , plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian					dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.260

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			daya tarik, kekerasan, <i>impact resistance</i> , ketahanan <i>fatigue</i> , serta efek temperatur tinggi.  Kode Subklasifikasi: AT004								
128.	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan	Kelompok ini mencakup	Usaha Jasa Konsul-	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.A.261

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
		Vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian.  Kode Subklasifikasi: AT006	tansi Kon-struksi Bersifat Spesialis				menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			
129.	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial	Kelompok ini mencakup kegiatan	Usaha Jasa Konsultansi	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.262

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			pengujian dan analisis teknis komponen atau bagian tertentu dari bangunan konstruksi gedung atau bangunan sipil untuk memastikan semua komponen atau bagian tertentu sesuai dengan standar, spesifikasi	Konstruksi Bersifat Spesialis				usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA:  3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.263

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			dan <i>output</i> dari bangunan konstruksi sesuai dokumen kontrak dan termasuk jasa <i>commissioning</i> proses industrial dan produksi pada fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia, dan panas								



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.264

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			bumi.  Kode Subklasifikasi: AT007								
130.	74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen	Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah,	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.  Kantor Perwakilan BUJKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.265

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			penyelenggaraan konstruksi terkait ruangan interior untuk kebutuhan fisik, estetik, dan fungsi termasuk penggambaran dekorasi interior untuk bangunan gedung dan bangunan	dan Besar				diperpanjang.			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.266

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
			sipil.  Kode Subklasifikasi: AR003								
131.	71201	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.	N/A	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	30 hari	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.A.267

No.	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
				Skala Usaha	Luas Lahan						
132.	74321	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi.	N/A	N/A	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	65 hari	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	Seluruh	Menteri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.1

**B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	41011 41012 41013 41014 41015 41016 41017 41018 41019 41020 42101 42102 42103	15 Hari	3 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Menteri

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.2

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		42104				
		42201				
		42202				
		42203				
		42204				
		42205				
		42206				
		42207				
		42209				
		42911				
		42912				
		42913				
		42914				
		42915				
		42916				

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038635 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.3

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		42917				
		42918				
		42919				
		42921				
		42922				
		42923				
		42924				
		42930				
		43110				
		43120				
		43212				
		43213				
		43214				
		43215				
		43216				

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038634 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.4

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		43221				
		43222				
		43223				
		43224				
		43291				
		43292				
		43299				
		43301				
		43302				
		43303				
		43304				
		43305				
		43309				
		43901				
		43902				

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038633 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.5

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		43903 43904 43905 43909 70209 71101 71102 71202 71206 74120				
2.	Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi	71102 43224 43301 43303 43304	15 Hari	5 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Menteri

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038632 C





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

I.8.B.6

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
3.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	71201	30 Hari	3 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Menteri
4.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi	74321	65 Hari	3 tahun dan dapat diperpanjang	Seluruh	Menteri
5.	Izin perusahaan sumber daya air*	Semua Kegiatan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Air meliputi:  1. Pemanfaatan air sebagai bahan baku utama;  2. Pemanfaatan air sebagai bahan baku	7 Hari	10 tahun, dan dapat diperpanjang	Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional	Menteri
					Wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Gubernur
					Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota	Bupati/Wali Kota

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.7

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		pendukung; 3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi; 4. Pemanfaatan ruang pada sumber air; 5. Pemanfaatan daya air; dan/atau 6. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut di atas				

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038630 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.8

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
6.	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol antara lain:  1. Ruang manfaat jalan (rumaja); 2. Ruang milik jalan (rumija); 3. Ruang pengawasan jalan (ruwasja).	17 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Nasional	Menteri
			17 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Provinsi	Gubernur
			17 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota
			14 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-bagian Jalan Tol	Menteri

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.8.B.9

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
7.	Izin Pembangunan Simpang Susun dan Prasarana Transpotasi Lain Sejajar Jalan Tol		20 Hari	2 tahun dan dapat diperpanjang	Bersinggungan dengan Jalan Tol	Menteri

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha

SK No 038628 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	41011	Konstruksi Hunian Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
2.	41011	Bangunan Hunian Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.2

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA.		
3.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
4.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.3

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
5.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
6.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.4

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kantor Perwakilan BUJKA.		
7.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.5

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
8.	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
9.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.6

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
10.	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
11.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.7

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12.	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
13.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.8

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
14.	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
15.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.9

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
16.	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi GT008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
17.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BG009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar 3. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.10

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18.	41020	Pekerjaan konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Gedung	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KP001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis 3. Risiko Menengah Tinggi
19.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.11

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20.	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
21.	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi 3. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.12

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
22.	42103	Konstruksi Jalan Rel	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar 3. Risiko Menengah Tinggi
23.	42104	Konstruksi Terowongan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK014; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.13

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24.	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
25.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.14

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
26.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
27.	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.15

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil <i>Electrical</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
29.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil <i>Electrical</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.16

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
30.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	sesuai dengan ketentuan lembaga oss	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
31.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.17

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
32.	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
33.	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS020; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.18

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
34.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
35.	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.19

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
36.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
37.	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.20

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
38.	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
39.	42914	Pengerukan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.21

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
40.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
41.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
42.	42916	Konstruksi Bangunan	Standar Penetapan	sesuai dengan	1. Kewajiban *) bagi BUJK	Sebelum	1. Kode subklasifikasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.22

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Sipil Pertambangan	Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	ketentuan lembaga oss	Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	BS014; 2. Usaha Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
43.	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.23

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
44.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS015; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
45.	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.24

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
46.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS016; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
47.	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.8.A.25

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
48.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS.	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS017; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
49.	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.26

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50.	42921	Konstruksi <i>Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
51.	42922	Konstruksi Pelindung Pantai	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
52.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas	Standar Penetapan Kemampuan	Sesuai dengan ketentuan	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan	Sebelum melaksanakan	1. Kode subklasifikasi BS018;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.27

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Lembaga OSS	Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	layanan usaha jasa konstruksi;	2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
53.	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.28

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
54.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi BS019; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
55.	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi ST011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.29

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
56.	42930	Pekerjaan Konstruksi Pra Pabrikasi Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KP002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
57.	43110	Pembongkaran Bangunan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.30

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
58.	43120	Penyiapan Lahan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
59.	43120	Pekerjaan Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.31

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
60.	43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
61.	43120	Survei Penyelidikan Lapangan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PL007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.32

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
62.	43212	Instalasi Telekomunikasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN002; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
63.	43213	Instalasi Elektronika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.33

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
64.	43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
65.	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
66.	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan	Standar Penetapan Kemampuan	Sesuai dengan ketentuan	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK	Sebelum melaksanakan	1. Kode subklasifikasi IN011; 2. Usaha Pekerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.34

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Raya	Badan Usaha Jasa Konstruksi	Lembaga OSS	Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	layanan usaha jasa konstruksi;	Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
67.	43221	Instalasi saluran air ( <i>plumbing</i> )	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
68.	43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.35

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
69.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
70.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.36

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
71.	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN009; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
72.	43291	Instalasi Mekanikal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.37

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
73.	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN014; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis 3. Risiko Menengah Tinggi
74.	43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur dan Pertambangan Manufaktur	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.38

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
75.	43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi IN010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
76.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.39

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
77.	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB002; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
78.	43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi KK007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
79.	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB003; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.40

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
80.	43303	Pengecatan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB007; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
81.	43303	Pengecatan	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB008; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.41

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
82.	43304	Dekorasi Interior	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB004; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
83.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.42

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
84.	43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB006; 2. Usaha Orang Perseorangan Pekerjaan Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
85.	43305	Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
86.	43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode subklasifikasi PB009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.43

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
87.	43901	Pondasi Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
88.	43902	Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> )	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PL008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.44

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Kantor Perwakilan BUJKA.		
89.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roof Covering</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
90.	43904	Pemasangan Kerangka Baja	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK016; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.45

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
91.	43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PA001; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
92.	43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton ( <i>Rigid Pavement</i> )	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK005; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.46

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
93.	43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK006; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
94.	43909	Perkerasan Aspal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK008; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.47

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
95.	43909	Perkerasan Berbutir	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK009; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
96.	43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan ( <i>Drilling and Grouting</i> )	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK010; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.48

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
97.	43909	Pekerjaan Struktur Beton	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK012; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
98.	43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik ( <i>Post Tensioned</i> )	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK013; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.49

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
99.	43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Annealing, Flare, atau Incinerator)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: KK015; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
100.	43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: PB011; 2. Usaha Pekerjaan Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.50

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
101.	70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
102.	71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.51

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
103.	71101	Jasa Arsitektural Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
104.	71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL001 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.52

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
105.	71101	Jasa Pengembangan Wilayah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
106	71101	Jasa Pengembangan Perkotaan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.53

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
107.	71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AL004 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
108.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK001 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.54

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
109.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
110.	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.55

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
111	71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK004 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
112	71102	Jasa Rekayasa Lainnya	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RK005 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.56

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
113.	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT002 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
114.	71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: RT003 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.57

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
115	71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
116	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT002; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.58

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
117.	71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT003; 2. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
118.	71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT004; 2. Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.59

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
119	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT005; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
120	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT006; 2. Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.60

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
121	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oseanografi	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT007; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
122	71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oseanografi	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan; dan 2. Melakukan pencatatan pengalaman usaha orang perseorangan.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: IT008; 2. Usaha Orang Perseorangan Jasa Konsultansi Konstruksi; 3. Risiko Menengah Tinggi.
123	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA;	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT001; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.61

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		3. Risiko Menengah Tinggi.
124	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT002; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
125	71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT004; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.62

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
126	71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT005; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
127	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT003; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.63

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.		
128	71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan Vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT006; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.
129	71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses <i>Industrial</i>	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Nasional serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AT007; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis; 3. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.64

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					BUJKA.		
130	74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Kewajiban *) bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing, dan Kantor Perwakilan BUJKA; 2. Kewajiban **) tambahan khusus BUJK PMA dan Kantor Perwakilan BUJKA.	Sebelum melaksanakan layanan usaha jasa konstruksi;	1. Kode Subklasifikasi: AR003; 2. Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum, Kualifikasi Kecil, Menengah dan Besar; 3. Risiko Menengah Tinggi.
131	74120	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17065:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi; dan 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	1. Pelaku Usaha: Badan Hukum; 2. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.65

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.66

No	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
132	74321	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Sesuai dengan ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17024:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi; dan 3. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.	1. Pelaku Usaha: Badan Hukum; 2. Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.A.67

Keterangan:

- \*) Kewajiban bagi BUJK Kualifikasi Kecil, Menengah, dan Besar, serta BUJK Penanaman Modal Asing dan Kantor Perwakilan BUJKA:
1. Melaporkan kegiatan usaha tahunan.
  2. melakukan pencatatan pengalaman badan usaha.
  3. menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi:
    - a. standar mutu bahan;
    - b. standar mutu peralatan;
    - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
    - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
    - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
    - f. standar operasi dan pemeliharaan.
    - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- \*\*) Kewajiban tambahan khusus BUJK Penanaman Modal Asing dan Kantor Perwakilan BUJKA:
- A. BUJK Penanaman Modal Asing wajib:
    1. Memenuhi struktur permodalan sebagai berikut:
      - BUJK asing Non-ASEAN paling banyak 67%
      - BUJK asing ASEAN paling banyak 70%
    2. Memenuhi kriteria teknis penanam modal sebagai berikut:
      - a. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri meliputi:
        - BUJKN;
        - memiliki SBU Konstruksi;
        - memiliki kualifikasi besar; dan
        - memiliki kegiatan usaha yang sama dengan penanam modal asing.
      - b. Kriteria penanam modal asing meliputi:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.8.A.68

- berbentuk badan usaha Jasa Konstruksi di negara asal;
- memiliki sertifikat bidang Jasa Konstruksi di negara asal yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- memiliki kualifikasi besar; dan
- memiliki kegiatan usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.

**B. Kantor Perwakilan BUJKA wajib:**

1. membentuk KSO dengan BUJKN yang memenuhi kriteria teknis KSO sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum perseroan terbatas;
  - b. memiliki SBU Konstruksi kualifikasi besar dan kesamaan subklasifikasi dengan Kantor Perwakilan BUJKA; dan
  - c. berbentuk BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
2. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan
  - b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO.
3. KSO untuk pelaksanaan jasa Konsultasi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seluruh pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dilakukan di dalam negeri; dan
  - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO.
4. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
5. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
6. melaksanakan proses alih teknologi;
7. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan
8. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah dua tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)  
SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	41011	Konstruksi Gedung Hunian (BG001)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi  (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)	15 hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha: a. Data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. Data kinerja manajemen perusahaan; dan c. Data kinerja proyek. 2. Memasang papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit:	1. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali 2. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontrak 3. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggantian 4. Selama	
		41011	Bangunan Gedung Hunian (GT001)					
		41012	Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002)					
		41012	Konstruksi Gedung Perkantoran (GT002)					
		41013	Konstruksi Gedung Industri (BG003)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		41013	Konstruksi Gedung Industri (GT003)			a. Informasi proyek; dan	menjabat	
		41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (BG004)			b. Nomor pengaduan yang ditetapkan pemerintah	5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SBU terbit	
		41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan (GT004)			3. Melaporkan perubahan apabila terjadi penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTB, atau PJSKB).		
		41015	Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005)			4. PJB, PJTB dan PJSKB tidak merangkap jabatan BUJK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat		
		41015	Konstruksi Gedung Kesehatan (GT005)					
		41016	Konstruksi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Gedung Pendidikan (BG006)			5. pernyataan. Pemenuhan peralatan konstruksi		
		41016	Konstruksi Gedung Pendidikan (GT006)					
		41017	Konstruksi Gedung Penginapan (BG007)					
		41017	Konstruksi Gedung Penginapan (GT007)					
		41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (BG008)					
		41018	Konstruksi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (GT008)					
		41019	Konstruksi Gedung Lainnya (BG009)					
		41020	Pekerjaan konstruksi prapabrikasi Bangunan Gedung (KP001)					
		42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001)					
		42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> (BS002)					
		42102	Bangunan Sipil					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Jembatan, Jalan Layang, <i>Fly Over</i> , dan <i>Underpass</i> (ST001)					
		42103	Konstruksi Jalan Rel (BS003)					
		42104	Konstruksi Terowongan (KK014)					
		42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004)					
		42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (BS005)					
		42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Bersih (ST002)					
		42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas (BS006)					
		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (BS007)					
		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (ST003)					
		42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(BS008)					
		42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (BS009)					
		42207	Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (PL005)					
		42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (BS020)					
		42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (BS010)					
		42911	Konstruksi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (ST004)					
		42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (BS011)					
		42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (ST005)					
		42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (BS012)					
		42914	Pengerukan (PL002)					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (BS013)					
		42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (ST006)					
		42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (BS014)					
		42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (ST007)					
		42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (BS015)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (ST008)					
		42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (BS016)					
		42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (ST009)					
		42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (BS017)					
		42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(KK002)					
		42921	Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air (KK003)					
		42922	Konstruksi Pelindung Pantai (KK004)					
		42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (BS018)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya (ST010)					
		42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit (BS019)					
		42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit (ST011)					
		42930	Pekerjaan Konstruksi Pra-					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			pabrikasi bangunan sipil (KP002)					
		43110	Pembongkaran Bangunan (PL001)					
		43120	Penyiapan Lahan Konstruksi (PL003)					
		43120	Pekerjaan Tanah (PL004)					
		43120	Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas (PL006)					
		43120	Survei Penyelidikan Lapangan (PL007)					
		43212	Instalasi Telekomunikasi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(IN002)					
		43213	Instalasi Elektronik (IN006)					
		43214	Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara (IN005)					
		43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (IN012)					
		43216	Instalasi Sinyal dan Rambu-rambu Jalan Raya (IN011)					
		43221	Instalasi Saluran Air ( <i>plumbing</i> ) (IN007)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43222	Instalasi Pemanas dan Geotermal (IN013)					
		43223	Instalasi Minyak dan Gas (IN004)					
		43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (IN008)					
		43291	Instalasi Mekanikal (IN001)					
		43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (IN014)					
		43299	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			(IN003)					
		43299	Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik (IN010)					
		43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (PB001)					
		43302	Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara (KK007)					
		43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (PB003)					
		43303	Pengecatan (PB007)					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43304	Dekorasi Interior (PB004)					
		43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni (PB005)					
		43305	Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi (PB010)					
		43309	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil (PB009)					
		43901	Pondasi Konstruksi (KK001)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43902	Pemasangan Perancah ( <i>Steiger</i> ) (PL008)					
		43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ <i>Roofcovering</i> (KK011)					
		43904	Pemasangan Kerangka Baja (KK016)					
		43905	Penyewaan Peralatan Konstruksi (PA001)					
		43909	Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton ( <i>Rigid Pavement</i> ) (KK005)					
		43909	Pekerjaan Konstruksi Kedap					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Air, Minyak, dan Gas (KK006)					
		43909	Perkerasan Aspal (KK008)					
		43909	Perkerasan Berbutir (KK009)					
		43909	Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan ( <i>Drilling and Grouting</i> ) (KK010)					
		43909	Pekerjaan Struktur Beton (KK012)					
		43909	Konstruksi Struktur Beton Pascatarik ( <i>Post Tensioned</i> ) (KK013)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		43909	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) (KK015)					
		43909	Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi (PB011)					
		70209	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur (RT001)	Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)	15 hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha: a. Data kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. Data kinerja manajemen	1. Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		71101	Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001)					
		71101	Jasa Arsitektural					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya (AR002)					
		71101	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang (AL001)			perusahaan; dan c. Data kinerja proyek.	2. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah penggantian	
		71101	Jasa Pengembangan Wilayah (AL002)			2. Melaporkan perubahan apabila terjadi penggantian tenaga kerja konstruksi (PJB, PJTBU, atau PJSKBU).	3. Selama menjabat	
		71101	Jasa Pengembangan Perkotaan (AL003)			3. PJB, PJTBU dan PJSKBU tidak merangkap jabatan BUJK lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.		
		71101	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap (AL004)					
		71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Non hunian (RK001)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003)					
		71102	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal dalam Bangunan (RK004)					
		71102	Jasa Rekayasa Lainnya (RK005)					
		71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit,					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik (RT002)					
		71102	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi (RT003)					
		71102	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika (IT001)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah (IT002)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Pembuatan Peta (IT003)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum (IT004)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas (IT005)					
		71102	Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i> (IT007)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi,					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Geofisika dan Geokimia (AT001)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian (AT002)					
		71102	Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium (AT004)					
		71102	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i> (AT005)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71202	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal (AT003)					
		71202	Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian (AT006)					
		71206	Jasa <i>Commissioning</i> Proses Industrial (AT007)					
		74120	Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil (AR003)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
2.	Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK)	43224	Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (IN009)	Standar Penetapan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	15 hari	Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan orang perseorangan: a. Data usaha orang perseorangan; dan b. Data kewajiban pelaksanaan berusaha.	Paling sedikit 1 (satu) tahun sekali	
		43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium (PB002)					
		43303	Pengecatan (PB008)					
		43304	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni (PB006)					
		71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas (IT006)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		71102	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanography (IT008)					
3.	Registrasi Kantor Perwakilan BUJKA	Sebagaimana Kode KBLI SBU Konstruksi diatas.	Sebagaimana judul Subklasifikasi SBU Konstruksi diatas.	Standar Pemenuhan Persyaratan Kantor Perwakilan BUJKA	3 hari	1. Memenuhi persyaratan ketentuan khusus Kantor Perwakilan BUJKA; dan 2. Membayar biaya registrasi;	1. Selama melaksanakan layanan Jasa Konstruksi; 2. Paling lama 7 (tujuh) hari	
4.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	71201	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha	30 hari	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, sebagai referensi SNI	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi; 2. Paling	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	si					ISO/IEC 17065:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundangundangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi  3. Paling sedikit 1 (satu) tahun	
5.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa	74321	Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi.	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	65 hari	1. Menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan	1. Selama melaksanakan kegiatan sertifikasi;	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Konstruksi					jasa, sebagai referensi SNI ISO/IEC 17024:2012 2. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi.	2. Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan lisensi  3. Paling sedikit 1 (satu) tahun	
6.	Izin pengusahaan		Seluruh KBLI yang Memanfaatkan	1. Syarat Administrasi: a. Nama, pekerjaan, dan alamat	Sebelum mengajukan izin	Kewajiban pemegang izin (sesuai dengan jenis pemanfaatan	Sepanjang masa berlaku izin	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Sumber Daya Air*		Sumber Daya Air	<p>pemohon</p> <p>b. Maksud dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air;</p> <p>c. Rencana tempat atau lokasi penggunaan Sumber Daya Air</p> <p>1. Sumber Air:</p> <p>2. Lokasi Penggunaan</p> <p>a) Kelurahan/Desa</p> <p>b) Kecamatan</p> <p>c) Kota/Kabupaten</p> <p>d) Provinsi</p> <p>e) Titik Koordinat Pengambilan/Pembuangan /Konstruksi</p> <p>d. Jangka waktu Penggunaan Sumber Daya Air yang diperlukan;</p>		<p>sumber daya air yang dilakukan), antara lain:</p> <p>1. Mematuhi ketentuan dalam perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air;</p> <p>2. Menyampaikan laporan pemakaian air harian, hasil uji kualitas air bulanan, tinggi muka air harian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi Perizinan Berusaha;</p>		

\*izin yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diperlukan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>e. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan;</p> <p>f. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; dan</p> <p>g. Perizinan berusaha.</p> <p>2. Syarat Teknis</p> <p>a. Studi kelayakan penggunaan Sumber Daya Air;</p> <p>b. Jumlah dan jadwal pengambilan</p>		<p>3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;</p> <p>4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;</p> <p>5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;</p> <p>6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;</p> <p>7. Mencegah</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan	Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian		Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Air; c. Dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan; d. Jumlah, kualitas dan jadwal pembuangan Air; e. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan; f. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan; g. Rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; h. Rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Daya Air; dan/atau i. Hasil konsultasi publik atas		terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; 8. Tidak menutup akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; 9. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi; 10. Menjamin		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha.		kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; 11. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; 12. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan/atau sarana yang dibangun 13. Apabila pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan sumber daya air wajib memberikan ganti rugi 14. Membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  15. Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat, dapat berupa:  a. Penambahan kapasitas saluran pembawa air		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						baku sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari dikali jumlah penduduk yang berada di sepanjang saluran pembawa air baku; dan/atau b. Penyediaan hidran umum dengan kapasitas maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari kapasitas pengolahan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						air bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan Perizinan Berusaha 16. Mendukung dan berperan aktif terhadap upaya yang dilakukan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan akses untuk masyarakat		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>terhadap sumber air yang diusahakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>17. Apabila menggunakan mata air, harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia</p> <p>b. Lokasi <i>intake</i></p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengambilan air harus berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air  c. Dalam hal pada jarak kurang dari 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air sudah terdapat konstruksi <i>intake</i> yang sudah terbangun, maka konstruksi tersebut harus segera		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						disesuaikan dengan arahan dari Pemberi Perizinan Berusaha  d. Wajib mendukung dan bekerjasama dengan BBWS/BWS atau instansi yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya dalam: 1) Melakukan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						<p>pengamanan fisik terhadap mata air; dan</p> <p>2) Melaksanakan penguasaan Negara atas Sumber Air.</p>		
7.	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Non Tol	35202 42212	Distribusi Gas Alam dan Buatan Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan	<p>1. Syarat Administrasi:</p> <p>a. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;</p> <p>b. Maksud dan tujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan;</p> <p>c. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan,</p>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	<p>1. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol;</p> <p>2. Harus ada andalalin</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Jangka waktu izin sesuai rekomendasi teknis yang diterbitkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Drainase	diameter kabel, dan lain-lain;		Kemenhub/ Dishub/serta kepolisian;		
		42213	Konstruksi Bangunan Elektrikal	d. Jangka waktu pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperlukan;		3. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) sesuai SE PU No.14 Tahun 2011;		
		42217	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	e. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;		4. Persyaratan lain yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan.		
		42219	Konstruksi Jaringan Eletrikal dan Telekomunikasi Lainnya	f. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);				
		73100	Periklanan	g. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);				
			Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan non tol	h. Foto copy KTP pemohon;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			termasuk kegiatan melewati jalan non tol yang dapat mempengaruhi struktur jalan non tol	<p>i. Foto copy akta pendirian beserta perubahannya;</p> <p>j. Nomor pokok wajib pajak; dan/atau</p> <p>k. memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.</p> <p>2. Syarat Teknis:</p> <p>a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;</p> <p>b. Analisis risiko;</p> <p>c. Studi lingkungan; dan/atau</p> <p>d. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.</p> <p>Khusus untuk akses jalan keluar - masuk/pembukaan median, yaitu:</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Harus ada kajian analisa konstruksi (tekanan angin) yang disahkan oleh tenaga ahli.				
8.	Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Tol	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	1. Syarat Administrasi: a. Nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; b. Maksud dan tujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan; c. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain; d. Jangka waktu pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperlukan; e. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	1. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol; 2. Notulen hasil Koordinasi dengan BUJT; 3. Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting; 4. Surat pengantar dari Pemda	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Jangka waktu izin sesuai rekomendasi teknis yang diterbitkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		42212	Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase	lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;		setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr); dan		
		42213	Konstruksi Bangunan Elektrikal	f. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);		5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan.		
		42217	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	g. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);				
		42219	Konstruksi Jaringan Eletrikal dan Telekomunikasi Lainnya	h. Foto copy KTP pemohon;				
			Semua konstruksi sipil yang sejajar	i. Foto copy akta pendirian beserta perubahannya;				
				j. Nomor pokok wajib pajak; dan/atau				
				k. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.				
				2. Syarat Teknis:				
				a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis,				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.8.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			jalan tol	serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan <i>maps</i> , foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain; b. Analisis risiko; c. Metode pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas; d. Studi lingkungan; dan/atau e. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.				
		73100	Periklanan					
			Semua kegiatan yang memanfaatkan dan menggunakan bagian-bagian jalan tol termasuk kegiatan melewati jalan non tol yang dapat mempengaruhi struktur jalan tol					